

Implementation And Challenges Of IFRS Convergence To PSAK In Writing Financial Statements Of Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In Indonesia

Implementasi Dan Tantangan Konvergensi IFRS Terhadap PSAK Dalam Penulisan Laporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Indonesia

Ma'ul Taufiq¹⁾

¹⁾ Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: ¹⁾ maful@dosen.pancabudi.ac.id

ARTICLE HISTORY

Received [05 April 2025]

Revised [08 May 2025]

Accepted [10 May 2025]

KEYWORDS

IFRS, PSAK, Financial Statement, MSMEs, Indonesia.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Laporan keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dan informasi yang sangat penting, yang merangkum seluruh aktivitas perusahaan. Keberadaannya memainkan peran penting bagi para pemangku kepentingan dalam menilai peluang bisnis potensial dan mengalokasikan modal secara efektif. Meskipun diakui secara internasional, Indonesia dan sebagian besar negara berkembang secara bertahap telah mengadopsi International Financial Reporting Standards (IFRS) ke dalam standar akuntansi nasional mereka. Namun, adopsi ini belum sepenuhnya diterima oleh para praktisi bisnis di Indonesia, terutama di kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi PSAK berbasis IFRS oleh UMKM di Indonesia, serta tantangan dan hambatan yang mereka hadapi selama proses tersebut. Dengan menggunakan sampel tiga pelaku UMKM, studi ini menemukan bahwa tantangan utama berasal dari keterbatasan pengetahuan dan kualifikasi sumber daya manusia, kompleksitas IFRS, dan ketidakkonsistenan peraturan yang menyebabkan kebingungan.

ABSTRACT

Financial statements serve as a crucial communication and informational tool, summarizing a company's entire range of activities. Their existence plays a vital role for stakeholders in assessing potential business opportunities and allocating capital effectively. Although recognized internationally, Indonesia and most developing countries have gradually adopted the International Financial Reporting Standards (IFRS) into their national accounting standards. However, this adoption has not been fully embraced by business practitioners in Indonesia, particularly among Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study aims to examine the implementation of IFRS-based PSAK (Indonesian Financial Accounting Standards) by MSMEs in Indonesia, as well as the challenges and obstacles they encounter throughout the process. Using a sample of three MSME actors, the study finds that the primary challenges stem from limited knowledge and qualifications of human resources, the complexity of IFRS, and regulatory inconsistencies that lead to confusion.

PENDAHULUAN

Laporan keuangan secara definitif merujuk pada hasil dari proses pencatatan keuangan yang dapat mencerminkan prestasi manajemen laba suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan keuangan ditujukan sebagai alat informasi dan komunikasi penting yang merangkum seluruh aktivitas perusahaan bagi stakeholders. Hal ini menjadikan penting bagi laporan keuangan untuk disajikan dengan jelas, akurat, dan jujur (Ardiyos, 2017). Dalam implementasinya, laporan keuangan yang disajikan harus sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan diterima secara umum (Generally Accepted Accounting Principles/GAAP) agar dapat dimengerti oleh pihak eksternal. Hal inilah yang menjadikan negara di dunia memiliki sebuah standar akuntansi khusus yang diakui, yakni International Financial Reporting Standards (IFRS) (Lestari, 2024).

IFRS merupakan standar akuntansi yang dibentuk berdasarkan International Accounting Standard (IAS). Dalam penerapannya, IFRS mengenal istilah adopsi dan konvergensi. Adopsi merujuk pada penggantian seluruh standar akuntansi nasional, sementara konvergensi merujuk pada mekanisme perubahan bertahap yang dilakukan negara untuk meminimalisir gap antara IFRS dan standar akuntansi nasional yang berlaku di negaranya (Martani dalam Ulfah & Azizah, 2017).

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan umumnya disajikan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Di Indonesia, prinsip ini dimanifestasikan ke dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK merupakan buku petunjuk dari prosedur akuntansi yang berisi peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan yang telah didusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) yang didasari atas kondisi yang sedang terjadi dan telah disepakati oleh lembaga atau institusi resmi (Irianto, 2017). Per tahun 2008 lalu, Indonesia melaksanakan

konvergensi IFRS terhadap Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Dibandingkan negara maju yang melakukan penerapan IFRS secara penuh sejak Januari 2005 lalu, pengadopsian ketentuan dan standar IFRS di negara berkembang—termasuk Indonesia— umumnya dilakukan secara bertahap. IAI (dalam Bharata, et. al., 2020) menyatakan bahwa konvergensi IFRS terhadap standar akuntansi nasional berperan penting untuk menciptakan keterbandingan laporan keuangan dan peningkatan transparansi. Hal ini memberikan dampak signifikan bagi keterlibatan stakeholders, terutama dalam pengambilan keputusan terkait alokasi modal bagi perusahaan potensial. Sebagai salah satu standar kokoh yang disusun oleh para dewan ahli, penggunaan standar akuntansi berbasis IFRS dalam penulisan laporan keuangan menjadi salah satu poin penting bagi pelaku usaha.

Sejak awal perkembangannya, penerapan IFRS dalam PSAK di Indonesia hanya menasar pada perusahaan yang memiliki akuntabilitas, seperti BUMN, Emiten, Perusahaan Publik, Perbankan, juga Asuransi (Martani dalam Ulfah & Azizah, 2017). Selain bagi pelaku usaha dengan skala besar, PSAK dan IFRS juga kerap dianjurkan bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Sebagai komponen dalam perputaran bisnis, UMKM kerap dipandang sebagai satu strategi efektif untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Hal ini menjadikan kedudukannya dinilai penting untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi, daya saing, hingga menciptakan lapangan pekerjaan. Meski dalam implementasinya tidak sekompleks perusahaan skala besar, laporan keuangan turut memegang peranan penting bagi para pelaku UMKM. Meskipun implementasi IFRS terhadap PSAK dianggap penting, masih banyak UMKM di Indonesia yang belum menerapkannya secara optimal (Hidayat & Kristianti, 2020).

Kontras dengan posisi pentingnya dalam perekonomian, keengganan para pelaku UMKM untuk mengimplementasikan PSAK berbasis IFRS menjadi sorotan penting dalam artikel ini. Artikel ini menganalisis realitas implementasi PSAK berbasis IFRS yang telah dijalankan oleh para pelaku UMKM di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang memengaruhi penerapan standar tersebut.

LANDASAN TEORI

International Financial Reporting Standards (IFRS)

International Financial Reporting Standards (IFRS) merupakan standar akuntansi internasional yang diharapkan dapat menciptakan harmonisasi terhadap seluruh standar akuntansi di dunia (Bharata, et. al., 2020). Standar ini dikembangkan dengan basis standar global yang didukung oleh empat organisasi utama dunia, yakni International Accounting Standards Board (IASB), Commission of the Europe Union/Europe Commission (EC), International Organization of Securities Commission (IOSCO), dan International Federation of Accountants (IFAC), serta dipersiapkan untuk laporan keuangan perusahaan-perusahaan di dunia (Choi, et. al., 1999). IFRS dalam implementasinya memiliki serangkaian karakteristik, yakni: a) menggunakan principle based, b) membutuhkan professional judgement, c) menggunakan penilaian fair value, dan mengharuskan lebih banyak disclosure.

Pasca penyusunannya, IFRS kemudian melalui tahap adopsi atau konvergensi oleh negara-negara internasional. Dalam implementasinya di Indonesia, konvergensi IFRS dilaksanakan melalui tiga tahap utama, di antaranya:

1. Tahap adopsi, merujuk pada proses adopsi seluruh standar IFRS ke PSAK, meliputi kebutuhan infrastruktur serta evaluasi terhadap PSAK yang telah berlaku. Proses ini dijalankan dalam periode tahun 2008 hingga 2011;
2. Tahap persiapan akhir, merujuk pada penyelesaian persiapan infrastruktur yang dibutuhkan. Dalam proses yang sama, standar PSAK berbasis IFRS mulai diberlakukan secara bertahap sejak tahun 2011; dan
3. Tahap implementasi, merujuk pada implementasi PSAK berbasis IFRS secara bertahap yang turut diiringi dengan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan terhadap dampak penerapannya secara komprehensif. Beriringan dengan tahap persiapan akhir, implementasi juga dijalankan dalam periode tahun yang sama.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan suatu buku petunjuk atau standar prosedur akuntansi yang berisi serangkaian peraturan tentang perlakuan, pencatatan, penyusunan, dan penyajian laporan keuangan. PSAK dalam eksistensinya disusun langsung oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) berdasarkan kondisi yang terjadi dalam realitas masyarakat, telah disepakati, serta telah disahkan oleh lembaga resmi (Ulfah & Azizah, 2017). Per 1 Januari 2024 lalu, SAK mulai diklasifikasikan ke dalam tiga tier berbeda (Wijaya, 2017), di antaranya:

1. Tier 1: SAK Indonesia, merujuk pada standar akuntansi nasional yang secara substansial telah dikonvergensi dengan standar IFRS;
2. Tier 2: SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), merujuk pada standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan; dan
3. Tier 3, SAK Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM), merujuk pada standar keuangan yang digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan, serta memenuhi definisi dan kriteria sebagai entitas mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Indonesia No. 20 Tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi serta tantangan konvergensi IFRS terhadap PSAK, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan oleh UMKM di Indonesia.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah studi kasus pada beberapa UMKM di Indonesia yang telah atau sedang berupaya menerapkan PSAK berbasis IFRS, terutama PSAK EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah).

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan pelaku UMKM dan profesional keuangan
2. Dokumentasi, seperti laporan keuangan, pedoman PSAK EMKM, dan dokumen pendukung lainnya
3. Studi pustaka, dari literatur akademik dan regulasi terkait IFRS dan PSAK

Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan tahapan:

1. Reduksi data
2. Penyajian data
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi konvergensi IFRS terhadap PSAK, khususnya melalui penerapan PSAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (PSAK EMKM), masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktik pelaporan keuangan UMKM di Indonesia. Secara umum, kesadaran pelaku UMKM terhadap pentingnya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi masih rendah. Banyak UMKM yang belum memahami substansi PSAK EMKM maupun relevansinya terhadap kegiatan bisnis mereka. Sebagian besar pelaku UMKM menyusun laporan keuangan hanya untuk keperluan administratif atau perpajakan, bukan untuk tujuan pengambilan keputusan yang strategis.

Dalam hal implementasi, ditemukan bahwa mayoritas UMKM belum menerapkan PSAK EMKM secara utuh. Faktor utama penghambat adalah rendahnya literasi akuntansi, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi berbasis IFRS, dan tidak adanya pendampingan teknis dari pihak profesional atau regulator. Selain itu, kurangnya pelatihan dan sosialisasi dari lembaga seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperlambat proses adopsi. Beberapa UMKM yang sudah mulai menerapkan PSAK EMKM melaporkan bahwa meskipun standar ini lebih sederhana dibanding PSAK umum, tetap dibutuhkan waktu dan biaya untuk menyesuaikan sistem pencatatan keuangan mereka.

Terdapat juga UMKM yang merasa terbantu dengan adanya PSAK EMKM karena standar ini memberikan pedoman yang lebih jelas dan ringkas. UMKM yang memiliki akses terhadap konsultan keuangan atau akuntan profesional lebih cenderung berhasil dalam mengimplementasikan standar ini. Penelitian ini juga menemukan bahwa dukungan dari lembaga keuangan seperti bank atau koperasi turut mendorong penerapan PSAK EMKM, terutama jika persyaratan pembiayaan mensyaratkan laporan keuangan yang disusun sesuai standar akuntansi.

Konvergensi IFRS melalui PSAK EMKM dinilai sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan UMKM di Indonesia. Namun, keberhasilan implementasinya sangat

tergantung pada upaya kolaboratif antara pemerintah, asosiasi profesi, akademisi, dan pelaku UMKM sendiri. Tanpa adanya pendampingan berkelanjutan, penyederhanaan regulasi, serta peningkatan kapasitas pelaku usaha, konvergensi IFRS terhadap PSAK di sektor UMKM berisiko tidak optimal dan hanya bersifat administratif semata.

Pembahasan

Implementasi Konvergensi IFRS Terhadap PSAK Dalam UMKM Di Indonesia

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sejatinya tidak memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan PSAK, terutama sesuai dengan standar berbasis IFRS sebagaimana dianjurkan oleh Pemerintah. Meski dinilai penting, nyatanya implementasi PSAK berbasis IFRS belum sepenuhnya dilakukan oleh para pelaku usaha. Salah satunya dapat ditinjau melalui UMKM Kripik Tempe Bunga Kantil yang berlokasi di Kota Magelang.

UMKM Kripik Tempe Bunga Kantil ini didirikan oleh Ibu Takim dan temannya sejak 2006 lalu. Hidayat dan Kristianti (2020) menyebutkan bahwa usaha tersebut sudah melakukan pencatatan dan membuat pembukuan selama 13 tahun terakhir. Tidak hanya pemilik usaha, pencatatan transaksi dan pengeluaran juga dicatat dan diawasi oleh partner UMKM tersebut. Pencatatan ini meliputi daftar stock barang yang masuk dan keluar, barang yang tersisa di tempat penyimpanan, pencatatan customer, hingga pencatatan jumlah kripik tempe yang telah terjual. Pencatatan juga dilakukan untuk menganalisis jumlah distributor dari tahun ke tahun. Pelaku usaha juga secara berkala membuat laporan keuangan yang ditujukan untuk menganalisis keuntungan dan kerugian setiap periode. Secara keseluruhan, penulisan laporan keuangan UMKM Kripik

Tempe Bunga Kantil menunjukkan adanya beberapa penyesuaian berstandar IFRS. Hal ini didukung dengan adanya pemahaman penerapan PSAK berbasis IFRS oleh pemilik usaha. Meski begitu, keterbatasan akan pemahaman ini pada akhirnya membawa keputusan untuk tidak menggunakan seluruh standar IFRS yang diadopsi ke dalam PSAK. Situasi ini juga didukung oleh keterbatasan waktu untuk mendalami standar dan mengaplikasikannya secara menyeluruh. UMKM Kripik Tempe Bunga Kantil juga mengalami keterbatasan sumber daya, sehingga laporan keuangan yang dibuat hanya berfokus pada laporan laba rugi dan laporan perubahan modal.

Contoh lain dapat ditinjau melalui Pabrik Tempe Kasmono di Kota Bogor dan UMKM Kerajinan Tangan Tas Souvenir DAR. Anggraeni, et. al. (2021) menyebutkan bahwa Pabrik tempe Kasmono hanya melakukan pencatatan sederhana yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Pabrik Tempe Kasmono memfokuskan catatan laporan keuangan berdasarkan pendapatan dan pengeluaran saja. Sebagaimana pada UMKM Kripik Tempe Bunga Kantil, Pabrik Tempe Kasmono juga mengalami kesulitan akibat minimnya pengetahuan akan akuntansi dan standar pencatatan keuangan. Hal ini sejalan dengan UMKM Kerajinan Tangan Tas Souvenir DAR yang didirikan oleh Ibu Nurhayati Budi Lestari. Ibu Nurhayati selaku pemilik usaha sejatinya telah menunjukkan adanya pemahaman dasar akan standar PSAK berbasis IFRS. Meski begitu, pemahaman tersebut belum dimiliki secara menyeluruh, sehingga penulisan pencatatan laporan keuangan juga tidak seluruhnya mengimplementasikan PSAK berbasis IFRS. Keterbatasan jumlah pegawai juga menjadi kendala besar yang membuat pemilik usaha kesulitan untuk mengaplikasikan standar tersebut. Meski begitu, Ibu Nurhayati menunjukkan pemahaman dasar akan pentingnya menyesuaikan standar sesuai IFRS untuk menarik investasi asing dalam pendanaan.

Tantangan Konvergensi IFRS Terhadap PSAK Dalam UMKM Di Indonesia

Bursa Efek Indonesia (dalam Irianto, 2017) mengklaim setidaknya terdapat dua tantangan akibat konvergensi IFRS terhadap PSAK, di antaranya adalah kesiapan infrastruktur, ketersediaan sumber daya, dan inkonsistensi regulasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Gusneli, et. al. (2023) yang menyatakan bahwa isu terbesar yang dihadapi perusahaan dalam penerapan IFRS adalah kendala sumber daya, kompleksitas IFRS, serta kepatuhan terhadap peraturan.

Pertama, kesiapan sumber daya manusia dalam implementasi. Standar IFRS dalam eksistensinya dititikberatkan pada penggunaan judgement yang berbasis prinsip. Standar yang tidak lagi dilakukan dengan sistem rule based menjadikan sumber daya profesional harus terus meningkatkan kualifikasinya untuk dapat mengikuti perubahan. IFRS mensyaratkan akuntan maupun auditor untuk memiliki pemahaman mengenai informasi keuangan, baik mengenai kejadian maupun transaksi bisnis dan ekonomi perusahaan agar dapat mengalokasikan secara tepat dalam proses pembuatan keputusan. Selain keahlian teknis, akuntan juga dituntut untuk mampu memahami implikasi etis dan legal dalam implementasi standar. Hal ini tidak hanya memberikan pengaruh signifikan bagi para akuntan, namun juga bagi pekerja profesional lain yang ikut serta dalam lini prosesnya (Carmona, et. al., 2008). Situasi ini dinilai cukup sulit untuk diatasi mengingat mayoritas UMKM umumnya tidak memiliki investasi dalam jumlah besar. Hal ini akhirnya berdampak pada ketidakmampuan pelaku usaha untuk dapat mengadopsi

sistem akuntansi yang canggih atau mempekerjakan tenaga profesional terlatih dengan kualifikasi tinggi. IFRS yang sejak awal tidak 'mengikat' pada akhirnya dikesampingkan akibat keterbatasan tersebut.

Kedua, kompleksitas dalam implementasi IFRS. Konvergensi IFRS terhadap PSAK tidak hanya memberikan perubahan signifikan pada standar penyusunan laporan keuangan, namun juga berdampak pada strategi operasional bisnis yang dijalankan pelaku usaha. UMKM 'dipaksa' untuk melakukan pengendalian internal dalam rangka memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan yang ditetapkan IFRS (Ulfah & Azizah, 2017). Menyasar pada poin keterbatasan sumber daya sebelumnya, perusahaan juga membutuhkan 'investasi' besar untuk dapat beralih menggunakan PSAK berbasis IFRS. Kompleksitas yang dihadirkan pada setiap amendemennya mengakibatkan banyak UMKM kerap kali kesulitan untuk memfasilitasi transisi dengan lancar (Gusneli, et. al., 2023). Hal ini kian diperparah dengan fakta sulitnya mengubah kebiasaan dan budaya usaha yang semula telah menggunakan standar akuntansi domestik. Kendala juga muncul mengingat adanya kebutuhan penerjemahan bahasa yang kerap kali tidak cocok/sesuai dan menimbulkan perbedaan persepsi terhadap informasi bisnis. Proses yang lama dan berkelanjutan ini akhirnya menciptakan kesulitan bagi sistem internal UMKM (Sukendar, 2009).

Terakhir, regulasi menciptakan inkonsistensi dan kebingungan bagi para profesional. Di Indonesia, implementasi PSAK berbasis IFRS dilakukan secara bertahap. Hal ini secara tidak langsung menciptakan berbagai perubahan berkelanjutan yang memaksa tenaga kerja untuk terus mengikuti perkembangannya. Di saat yang sama, sosialisasi, edukasi, dan pelatihan dinilai masih sangat minim. Pelaku usaha skala kecil memiliki kecenderungan untuk tidak mengenal atau memahami istilah, proses, serta berbagai tujuan dan manfaat penggunaan PSAK berbasis IFRS.

Situasi tersebut kemudian diperparah dengan fakta bahwa tidak ada regulasi yang secara resmi mengikat perusahaan untuk mengimplementasikan PSAK berbasis IFRS. Kurangnya informasi dan ketiadaan bimbingan dari pemerintah resmi pada akhirnya menciptakan kebingungan dan keengganan dari tenaga kerja profesional (Gusneli, et. al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa implementasi PSAK berbasis IFRS dalam industri UMKM merupakan suatu praktik yang sulit untuk dilakukan. Mengambil sampel dari UMKM Kripik Tempe Bunga Kantil, UMKM Pabrik Tempe Kasmono, dan UMKM Kerajinan Tangan Tas Souvenir DAR, ketiganya menunjukkan setidaknya terdapat tiga tantangan besar bagi pelaku usaha, di antaranya adalah keterbatasan pengetahuan, kompleksitas IFRS, serta inkonsistensi dalam regulasi. Akibatnya, laporan keuangan yang digunakan hanya berfokus pada pencatatan laba rugi dan perubahan modal semata. Dalam praktiknya, dibutuhkan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, serta asosiasi profesi, seperti IAI yang memungkinkan pelaku UMKM untuk mendapatkan edukasi, sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan menyeluruh dalam mengimplementasikan PSAK berbasis IFRS. Hal ini juga senantiasa perlu diiringi dengan konsistensi regulasi, penyederhanaan dan modifikasi standar akuntansi, serta pemberian insentif atau dukungan finansial yang memungkinkan pelaku UMKM dapat mengatasi isu keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar pemerintah, khususnya melalui Kementerian Koperasi dan UKM, lebih proaktif dalam menyosialisasikan dan mengedukasi pelaku UMKM mengenai pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK EMKM. Program pelatihan dan pendampingan teknis harus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kondisi lapangan, mengingat banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat bersinergi dengan institusi pendidikan, organisasi profesi seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan lembaga keuangan untuk menyediakan pelatihan reguler serta konsultasi gratis atau bersubsidi bagi UMKM.

Selain itu, perlu adanya penyederhanaan lebih lanjut terhadap instrumen pelaporan keuangan berbasis PSAK EMKM, misalnya dengan menyediakan template laporan keuangan yang mudah digunakan oleh UMKM skala mikro dan kecil. Langkah ini akan membantu menurunkan hambatan administratif dan teknis yang selama ini dirasakan oleh pelaku usaha. Peran teknologi juga perlu dimaksimalkan, seperti pengembangan aplikasi akuntansi berbasis PSAK EMKM yang mudah diakses dan dipahami.

Dari sisi regulator dan asosiasi profesi, diperlukan peningkatan upaya advokasi agar lembaga keuangan dan investor memberikan insentif kepada UMKM yang telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Hal ini akan memotivasi pelaku UMKM untuk lebih serius dalam

menerapkan PSAK EMKM, karena dirasakan manfaat langsungnya dalam akses pembiayaan dan kepercayaan mitra usaha. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian kuantitatif guna mengukur sejauh mana penerapan PSAK EMKM berkontribusi terhadap peningkatan kinerja keuangan UMKM. Dengan pendekatan yang lebih luas dan data yang lebih variatif, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas konvergensi IFRS dalam konteks UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyos. (2017). Kamus Standar Akuntansi. Jakarta: Citra Harta Prima Andayani.
- Bharata, et. al. (2020). International Financial Reporting Standards (IFRS) dan Proses Pengadopsiannya di Indonesia. *Jurnal Bisnis Darmajaya* 6 (2), 10-26.
- Carmona, et. al. (2008). *Public Space: the Management Dimension*. New York: Routledge, Taylor, & Francis Group.
- Choi, et. al. (1999). *International Accounting* Prentice Hall. New York: Upper Saddle River.
- Gusneli, et. al. (2023). Tantangan dan Peluang dalam Implementasi Standar Akuntansi Internasional Terbaru (IFRS). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science*, 2 (3), 205- 212.
- Hidayat, K. A. dan Kristianti, I. (2020). Analisis Penerapan International Financial Reporting Standards bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Dewantara*, 3 (1), 1-15.
- Hernawaty, H., Sari, M. M., & Wulandari, E. N. (2022). Predicting bankruptcy using Springate, Zmijewski, and Grover at PT blue bird tbk period 2016-2021. *International Journal of Economics and Management Research*, 1(2), 208-218.
- Irianti, A. B. (2017). Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi PSAK 45 (Standar Akuntansi untuk Organisasi Non-Profit. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Irawan, I. (2020). Perencanaan Keuangan Dan Manajemen Biaya Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Pelaku Usaha Di Desa Timbang Jaya Kecamatan Bahorok Langkat Sumatera Utara. *Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 278-289.
- Lestari, M. (2024). Perkembangan IFRS di Dunia dan Implementasi di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, dan Perpajakan, dan Tata Kelola Perusahaan*, 1 (3), 77-82.
- Pramono, C., Sari, M. M., & Soraya, E. (2022). Analysis Comparisonal of Financial Performance on Basic Chemical Sub Sector Manufacturing Company before and During Pandemic Covid 19 Registered Indonesia Stock Exchange Period 2019-2020. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2).
- Sukendar, H. (2009). Konvergensi Standar Laporan Keuangan ke Standar Pelaporan Keuangan Internasional, Apa, dan Bagaimana. *The Winners*, 10 (1), 10-21, doi:10.21512/tw.v10i1.712.
- Sari, M. M., Ardian, N., Saputra, R., & Tumanggor, A. W. (2023). The Influence of Bond Rating, Maturity and Coupon on Bond Prices on The Indonesian Stock Exchange. *PROSIDING UNIVERSITAS DHARMAWANGSA*, 3(1), 825-839.
- Taufiq, M., Lubis, A. F., & Mulyani, S. (2014). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 66-75.
- Ulfah, S. M. & Azizah, D. F. (2017). Analisis Perbedaan Tingkat Pengungkapan pada Instrumen Keuangan Sebelum dan Sesudah Penerapan International Financial Reporting Standard (IFRS) No. 7 (Studi pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2015). *Jurnal Administrasi Bisnis*, 50 (3), 198-207.
- Wijaya, S. I. (2017). *Accounting for Micro, Small, and Medium Entities in Indonesia*. [https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2017/december/emerging-economies- group/ap2b-micro-entities-by-indonesia.pdf](https://www.ifrs.org/content/dam/ifrs/meetings/2017/december/emerging-economies-group/ap2b-micro-entities-by-indonesia.pdf).